



**Laporan Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Area 2
Deregulasi Kebijakan
(Sampai dengan Juli 2022)**



Disampaikan pada Rabu, 27 Juli 2022



Kegiatan

1

Identifikasi dan Pemetaan Regulasi

2

Deregulasi Aturan

3

Penguatan Sistem Regulasi Nasional

4

Agenda Setting



1

A purple rectangular sticky note with a white border, tilted slightly, containing the number '1' in a bold black font. A red wavy line is attached to the left side of the note.

IDENTIFIKASI DAN PEMETAAN REGULASI

RENCANA AKSI IDENTIFIKASI DAN PEMETAAN REGULASI

1. Pemetaan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI terkait Barang Milik Negara.
2. Pemetaan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI terkait Penguatan Pengawasan.
3. Pemetaan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI terkait Kepegawaian.



CAPAIAN

IDENTIFIKASI DAN PEMETAAN REGULASI

Telah diselesaikan Pemetaan dan Evaluasi terhadap:

1. Persekjen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
2. Persekjen Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
3. Persekjen Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Belajar Bagi PNS Setjen dan BK DPR RI dan Persekjen Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tugas Belajar PNS Setjen dan BK DPR RI
4. 7 (Tujuh) Persekjen terkait Barang Milik Negara;

CAPAIAN

IDENTIFIKASI DAN PEMETAAN REGULASI

Telah diselesaikan Pemetaan dan Evaluasi terhadap:

5. Persekjen Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Setjen dan BK DPR RI dan Persekjen Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Setjen dan BK DPR RI.
6. Persekjen Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penilaian Kinerja Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

CAPAIAN

IDENTIFIKASI DAN PEMETAAN REGULASI

Telah diselesaikan Pemetaan dan Evaluasi terhadap:

7. 5 (Lima) Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai Pelimpahan Sebagian Wewenang kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi untuk dan Atas Nama Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
8. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1503/SEKJEN/2020 tentang Pedoman Sistem Manajemen Satu Data Sekretariat Jenderal DPR RI.

KEGIATAN YANG SEDANG DILAKSANAKAN

1. **Evaluasi Persekjen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih Pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;**
2. **Evaluasi Persekjen terkait Jabatan Fungsional;**
3. **Identifikasi dan Pemetaan terkait penerapan Sistem Merit**





2


Deregulasi Aturan

RENCANA AKSI DEREGULASI ATURAN

1. **Evaluasi Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 17 tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Setjen dan BK DPR RI**
2. **Identifikasi, Analisis, dan Harmonisasi Usulan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI untuk Prioritas Tahunan**



CAPAIAN

1. Telah diselesaikan Evaluasi terhadap Persekjen Nomor 17 tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum;
 2. Telah ditetapkan Persekjen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Produk Hukum Setjen DPR RI yang mencabut:
 - a. Persekjen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi Produk Hukum di Lingkungan Setjen dan BK DPR RI;
 - b. Persekjen Nomor 17 tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Setjen dan BK DPR RI.
 3. Telah disampaikan hasil identifikasi dan analisis terhadap Usulan Persekjen melalui aplikasi E-Legalitas.
- 



3



Penguatan Sistem Regulasi Nasional




RENCANA AKSI PENGUATAN SISTEM REGULASI NASIONAL

1. **Pengembangan JDIH
Setjen DPR RI**
2. **Sosialisasi dan Bimbingan
Teknis E-Legalitas**



CAPAIAN

PENGUATAN SISTEM REGULASI NASIONAL

1. Pengembangan JDIH Setjen DPR RI:
 - a. Tersedianya menu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
 - b. Tersedianya sistem Search Engine
 - c. Telah terintegrasinya JDIH Setjen DPR RI dengan unit-unit kerja terkait yang juga mengelola dokumen dan informasi hukum sebagai anggota JDIH Setjen DPR
 2. Telah dilakukan Sosialisasi E-Legalitas melalui portal.dpr.go.id
- 



KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN BERIKUTNYA:

Pengembangan JDIH dengan menu yang ditujukan bagi penyandang disabilitas.



4

Agenda Setting



RENCANA AKSI PENGUATAN SISTEM REGULASI NASIONAL

1. **Penetapan Program Pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Prioritas Tahunan**
2. **Inventarisasi Usulan Persekjen dari Unit Pengusul**



CAPAIAN DEREGULASI ATURAN

Telah ditetapkan Keputusan Sekjen Nomor 145/Sekjen/2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Prioritas Tahun 2022, yang memuat program pembentukan Persekjen untuk Prioritas Tahun 2022, berdasarkan hasil Identifikasi, Analisis yang dilakukan terhadap Usulan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI dari unit pengusul.



KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN SELANJUTNYA



- 1. Inventarisasi usulan peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI dari unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI di luar program yang telah ditetapkan**
- 2. Menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Prolegset Tahun 2023**



TERIMA
KASIH

